



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan 2023 Audited

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan memberi informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	7
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	8
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	9
LAPORAN KEUANGAN UTAMA	12
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
NERACA	14
LAPORAN OPERASIONAL	15
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	16
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	17
PENJELASAN UMUM	17
A.1 DASAR HUKUM	17
A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN	19
A.3 NILAI KINERJA ORGANISASI	20
A.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	21
A.5 BASIS AKUNTANSI	22
A.6 DASAR PENGUKURAN	22
A.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI	22
A.8 KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PENGGUNAAN AKUN KHUSUS COVID-19	29
A.9 CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN	29
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	34
B.2 BELANJA	36
B.2.1 BELANJA PEGAWAI	39
B.2.2 BELANJA BARANG	42
B.2.3 BELANJA MODAL	44
B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA	46
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	47
C.1 ASET	47
C.1.1 ASET LANCAR	48
C.1.2 ASET TETAP	50
C.1.3 ASET LAINNYA	52
C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56
C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	56
3 EKUITAS	56
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	57

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK	57
D.2 BEBAN PEGAWAI	57
D.3 BEBAN PERSEDIAAN	58
D.4 BEBAN BARANG DAN JASA	58
D.5 BEBAN PEMELIHARAAN	59
D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS	59
D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	60
D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	60
D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL	60
 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	 61
E.1 EKUITAS AWAL	61
E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO	61
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	62
E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	62
E.5 EKUITAS AKHIR	63
 PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	 64
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	64
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	64
LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG	65
CETAKAN LAPORAN KEUANGAN	66
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI	78
SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	9
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	10
Tabel 3 Penentuan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	28
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 6 Output Strategis (Prioritas Nasional)	30
Tabel 7 Output Tematik	30
Tabel 8 Output Prioritas Unggulan (PU)	32
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2023	33
Tabel 10 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	35
Tabel 12 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	37
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	37
Tabel 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2019 - 2023	37
Tabel 15 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	38
Tabel 16 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan, dan Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	39
Tabel 17 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	40
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	40
Tabel 19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2023	41
Tabel 20 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	42
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	42
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2023	43
Tabel 23 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	44
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	45
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 – 2023	45
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	47
Tabel 27 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	47
Tabel 28 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022	47
Tabel 29 Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022	48
Tabel 30 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	48
Tabel 31 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	49
Tabel 32 Tabel Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	50
Tabel 33 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2023 dan 2022	50
Tabel 34 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2023	50
Tabel 35 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022	51
Tabel 36 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	51
Tabel 37 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	52
Tabel 38 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	52
Tabel 39 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022	53
Tabel 40 Pelaksanaan RPATA	53
Tabel 41 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022	55
Tabel 42 Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	55
Tabel 43 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	56

Tabel 44 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	56
Tabel 45 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	57
Tabel 46 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	57
Tabel 47 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	58
Tabel 48 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	58
Tabel 49 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 ..	59
Tabel 50 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	59
Tabel 51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	60
Tabel 52 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	60
Tabel 53 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	61
Tabel 54 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal.....	61
Tabel 55 Perbandingan Surplus/Defisit LO	61
Tabel 56 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	63
Tabel 57 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 - 2023.....	38
Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	38
Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2023	41
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2023	41
Grafik 5 Komposisi Belanja Barang	43
Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2023	43
Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2023	45
Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 - 2023	46



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA 015.06 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tingkat UAPPA-E1 Tahun Anggaran 2023 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp271.307.012,00**. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp72.861.298.538,00** atau mencapai **97,6** persen dari anggaran sebesar **Rp74.646.676.000,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	271.307.012	-	187.642.654
Jumlah Pendapatan	-	271.307.012	-	187.642.654
Belanja Pegawai	4.127.431.000	3.854.232.000	13.931.013.000	13.671.787.310
Belanja Barang	46.941.867.000	45.436.045.543	37.583.647.000	36.648.320.288
Belanja Modal	23.577.378.000	23.571.020.995	3.363.816.000	3.300.891.450
Jumlah Belanja	74.646.676.000	72.861.298.538	54.878.476.000	53.620.999.048

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp26.812.721.118,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp1.331.829.540,00** Aset Tetap sebesar **Rp23.501.914.500,00**, Aset Lainnya sebesar **Rp1.978.977.078,00**.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar **Rp369.826.268,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar **Rp26.442.894.850,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	26.812.721.118	16.052.801.408	10.759.919.710
Aset Lancar	1.331.829.540	1.147.136.743	184.692.797
Aset Tetap	23.501.914.500	12.380.832.127	11.121.082.373
Aset Lainnya	1.978.977.078	2.524.832.538	(545.855.460)
Kewajiban	369.826.268	5.830.832	363.995.436
Kewajiban Jangka Pendek	369.826.268	5.830.832	363.995.436
Ekuitas	26.442.894.850	16.046.970.576	10.395.924.274
Ekuitas	26.442.894.850	16.046.970.576	10.395.924.274
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	26.812.721.118	16.052.801.408	10.759.919.710

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00**, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar **Rp67.044.170.612,00** sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar **Rp67.044.170.612,00**. Dengan memperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp268.626.170,00** menyebabkan entitas mengalami defisit LO sebesar **Rp66.775.544.442,00**.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp16.046.970.576,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp66.775.544.442,00, Koreksi yang Menambah Ekuitas sebesar Rp14.988.276,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp77.156.480.440,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.442.894.850,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2023, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN TA 2023 AUDITED DJPK

LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		271.307.012			187.642.654	
JUMLAH PENDAPATAN			271.307.012	-		187.642.654	
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.2.1	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14
Belanja Barang	B.2.2	46.941.867.000	45.436.045.543	96,79	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51
Belanja Modal	B.2.3	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13
JUMLAH BELANJA		74.646.676.000	72.861.298.538	97,61	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.2	65.722.182	53.414.748
Penyisihan Piutang tak Tertagih	C.1.1.3	(50.808.847)	(50.747.310)
Bukan Pajak		14.913.335	2.667.438
Piutang Bukan Pajak (Netto)		1.316.916.205	1.144.469.305
Persediaan	C.1.1.4		
Jumlah Aset Lancar		1.331.829.540	1.147.136.743
ASET TETAP	C.1.2		
Peralatan dan Mesin	C.1.2.1	122.508.086.200	103.764.804.143
Gedung dan Bangunan	C.1.2.2	1.427.595.200	1.427.595.200
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.3	669.888.518	651.888.518
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.4	64.705.508	0
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.5	(101.168.360.926)	(93.463.455.734)
Jumlah Aset Tetap		23.501.914.500	12.380.832.127
ASET LAINNYA	C.1.3		
Aset Tak Berwujud	C.1.3.1	10.672.409.204	9.891.147.694
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.3.2	372.809.751	0
Aset Lain-Lain	C.1.3.3	948.603.155	448.631.261
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.1.3.3	(10.014.845.032)	(7.814.946.417)
Jumlah Aset Lainnya		1.978.977.078	2.524.832.538
JUMLAH ASET		26.812.721.118	16.052.801.408
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.1	369.826.268	5.830.832
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		369.826.268	5.830.832
JUMLAH KEWAJIBAN		369.826.268	5.830.832
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	26.442.894.850	16.046.970.576
JUMLAH EKUITAS		26.442.894.850	16.046.970.576
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.812.721.118	16.052.801.408

Jakarta, Mei 2024

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman



LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	16.045.920
Pendapatan Hibah			
Jumlah Pendapatan Operasional		0	16.045.920
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.853.583.000	13.445.841.459
Beban Persediaan	D.3	743.613.328	690.101.447
Beban Barang dan Jasa	D.4	22.961.090.748	19.052.980.883
Beban Pemeliharaan	D.5	6.968.909.865	5.761.926.005
Beban Perjalanan Dinas	D.6	19.964.833.803	14.340.970.181
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	12.552.078.331	9.490.703.852
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	61.537	(17.146)
Beban Lain-Lain		0	0
Jumlah Beban Operasional		67.044.170.612	62.782.506.681
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(67.044.170.612)	(62.766.460.761)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar		257.379.170	149.446.792
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		257.379.170	149.446.792
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.247.000	16.040.000
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya		0	354.384.743
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		11.247.000	(338.344.743)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		268.626.170	(188.897.951)
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(66.775.544.442)	(62.955.358.712)

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	PERIODE	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	16.046.970.576	21.664.466.143
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(66.775.544.442)	(62.955.358.712)
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		14.988.276	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persedian	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	14.988.276	0
Koreksi lain-Lain	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	77.156.480.440	57.337.863.145
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	72.861.298.538	53.620.999.048
Diterima dari Entitas Lain	E.4.1	(271.307.012)	(187.642.654)
Transfer Keluar	E.4.2	(1.402.688.002)	(1.744.948.515)
Transfer Masuk	E.4.2	586.162.500	2.457.878.981
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	5.383.014.416	3.191.576.285
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		10.395.924.274	(5.617.495.567)
EKUITAS AKHIR	E.5	26.442.894.850	16.046.970.576

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01.2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
30. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata

Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga;

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023;
33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-24/PB/PB.6/2023 Hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19;
34. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Atas Beban (BA-015) dan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tugas dan Fungsi

Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan yang nyata dan luas kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai Keppres Nomor 165 Tahun 2000. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, dibentuklah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD) melalui KMK-02/KMK.1/2001. Pada masa ini lahir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mempertegas konsep *money follow function*.

Pada tahun 2004 terjadi reorganisasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 2004 di mana tugas dan fungsi DJPKPD digabungkan dengan 2 unit eselon I lainnya, yaitu bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) serta bersama Badan Analisa Fiskal menjadi Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI). Reorganisasi kembali terjadi pada tahun 2007. DJAPK dipisah menjadi DJPK dan DJA. Fungsi-fungsi yang sebelumnya digabung dengan BAPPEKI dikembalikan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melakukan reorganisasi dan delayering dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Reorganisasi tersebut mengubah struktur dan sistem kerja organisasi. Unit Eselon II DJPK pasca reorganisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Dana Transfer Umum
3. Direktorat Dana Transfer Khusus
4. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
5. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

7. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Daerah.

DJPK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah ditetapkan untuk menyempurnakan bentuk organisasi DJPK dalam melaksanakan tanggung jawab dan menghadapi tantangan yang semakin besar dan beragam serta dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Berdasarkan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi:

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

A.3 NILAI KINERJA ORGANISASI

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2023 DJPK telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) DJPK Tahun 2023, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja DJPK di tahun 2023. Pencapaian kinerja kedua puluh tiga IKU tersebut, sampai dengan Desember 2023 berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2023 sebesar 110,18. Pencapaian nilai NKO 2023 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2023, yaitu:

- sebesar 109,16 dari bidang stakeholder perspective (bobot 30%);

LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

- sebesar 110,24 dari bidang customer perspective (bobot 20%);
- sebesar 110,09 dari bidang internal process perspective (bobot 25%); dan
- sebesar 111,45 dari bidang learning and growth perspective (bobot 25%)

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks	Target 2022	Realisasi 2022
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				109,16		
1	Belanja Negara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat			109,16		
1a – CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	86,5	86,7	100,23	86,46	88,67
1b – CP	Indeks integritas organisasi	95,58	102,5	107,24		
1b1 – CP	Indeks integritas	91,16	95		90,66	91,96
1b2 – CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	110		-	-
1c – N	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,235	0,148	120	0,240	0,195
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				110,24		
2	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			105,92		
2a – CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi	86	94,84	110,28	85	93,35
2b-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF regional	100%	100%	100%	-	-
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			114,56		
3a – CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	103,85%	103,85%	4,45	4,42
3b – CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	119,83%	119,83%	-	-
3c – CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3	3,67	120	-	-

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks	Target 2022	Realisasi 2022
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				110,09		
4	Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal			120		
4a – N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	120	120	100	116,1
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat			105,20		
5a – N	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	31,94%	33,60%	105,20	28,94%	29,05%
6	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD			100		
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100%	100	100
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100%	-	-
7	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			115,15		
7a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84	89,5%	97,22%
7b – CP	Indeks Efektivitas UKI	82	97,26	118,61	-	-
7c – CP	Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%	91,49	120	-	-

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks	Target 2022	Realisasi 2022
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				111,45		
8	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			109,53		
8a – CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%	108,31%	108,31	100%	105,69%
8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120	3,55	3,77
8f-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	100%	100	-	-
9	Pengelolaan Keuangan yang optimal			113,46		
9a – CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	113,46	113,46	100	114,13
9a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4	103,9	114,93	90,4	103
9a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	105,44	105,44	95,5%	97,84%
9a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	85	141,18	120	80	98,8
10	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			116,23		
10a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	116,23%	116,23	100	111,53
10a1 - CP	Tingkat downtime sistem TIK	0,10%	0,0005%	120	0,1%	
10a2 – CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%	111%	120	90%	100%
10a3 – CP	Tingkat penyelesaian data analytics	85%	100%	108,70		
11	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			106,58		
11a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	110,13%	110,13	100	114,2
11b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	99,58%	108,24	92%	99,17%
11c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	96,31%	101,37	91,75%	103,16
11c1-CP	Tingkat implementasi learning organization	90%	92,61%	102,9	83,5	86,32
11c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	100%	100	100%	120%
NKO				110,18		

A.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.5 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6 DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada DJPK adalah sebagai berikut:

2.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

2.2 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.

2.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) BELANJA

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) BEBAN

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) ASET

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:

a) ASET LANCAR

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan.

Kas disajikan dalam Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan aset tetap lainnya

seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN.

c) PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

d) ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) KEWAJIBAN

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) EKUITAS

Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Penentuan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;	0,5%
Kurang lancar	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;	10%
Diragukan	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	100%

9) PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat aset tetap disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

10) AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

*Amortisasi
Aset Tak
Berwujud*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:

- Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- Lisensi;
- Waralaba (*Franchise*);
- Hak Cipta (*Copyright*); dan
- Hak Paten.

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

*Kebijakan atas
Pelaksanaan
Program
Penanganan
Pandemi
Covid-19 dan
Penggunaan
Akun Khusus
Covid-19*

A.8 KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PENGGUNAAN AKUN KHUSUS COVID-19

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Program PEN yang selanjutnya disebut PC-PEN merupakan aksi/tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani permasalahan yang diakibatkan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan pembelian desinfektan sebesar **Rp8.158.500,00** dengan akun 521131 pada tanggal 17 Januari 2023.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia. Melalui Keppres ini, Presiden juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Selaras dengan kebijakan tersebut, dokumen sumber belanja yang menggunakan akun penanganan Covid-19 per 1 Juli 2023 harus dilakukan revisi. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dalam KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penetapan akun khusus COVID-19 tersebut dimaksudkan untuk:

- a. memudahkan dalam perencanaan kegiatan, pengalokasian dana, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19; dan
- b. memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan revisi dokumen anggaran dengan akun penanganan pandemi Covid-19 menjadi Belanja Keperluan Perkantoran.

A.9 CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Selama Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Output
Strategis

Tabel 6 Output Strategis (Prioritas Nasional)

03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
1.	4779.UBB.201	Bimtek BUMDes (PN)	1.956.876.000	1.952.961.048	99,80	2.000 Desa	2.000 Desa	100%

Dalam rangka percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, dilakukan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa.

Realisasi output strategis “Bimtek BUMDes” sebesar **Rp1.952.961.048,00** atau **99,80** persen dari pagu TA 2023 sebesar **Rp1.956.876.000,00**.

Upaya yang telah dilaksanakan selama TA 2023 yaitu pelaksanaan *workshop* pendampingan BUMDes di 8 (delapan) kampus, yaitu di Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta), Universitas Andalas (Padang), Universitas Hasanudin (Makassar), Universitas Lampung (Lampung), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Siliwangi (Tasikmalaya), Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Trunojoyo Madura (Bangkalan).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga memiliki kegiatan dengan Rincian Output tematik yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG), sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 7 Output Tematik

Output
Tematik

No	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
1	4729.BMB.005	Publikasi Media Elektronik	112.743.000	112.640.000	99,91	3 Layanan	3 Layanan	100%
2	4781. FAD. 002	Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah	1.075.421.000	1.072.259.538	99,71	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	4779. FAC. 001	Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah Sub Komponen Implementasi PUG dalam TKD	185.340.000	178.358.754	96,23	1 dokumen	1 dokumen	100%

Publikasi Media elektronik telah menghasilkan 3 video (Video Bang Defis, Video Profil DJPK, dan Video UU HKPD, Dana Desa dan Insentif Fiskal). Sedangkan RO Rincian Alokasi Transfer ke Daerah telah menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan penetapan TKD dimana terdapat kebijakan implementasi ARG. Adapun berkenaan dengan RO Bimtek Transfer ke Daerah dengan Sub Komponen Implementasi PUG dalam TKD telah melaksanakan monitoring ke 11 pemda/ desa dan memperoleh data awal pengelolaan dan implementasi kebijakan TKD dalam perspektif ARG dari pemerintah kabupaten, desa, dan masyarakat selaku penerima manfaat.

Disamping itu, selama tahun 2023 terdapat Rincian Output (RO) yang merupakan Prioritas Unggulan (PU) sebanyak 11 RO, sebagaimana dijelaskan pada halaman berikut. **Prioritas Unggulan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit Eselon I yang berkontribusi langsung dalam pencapaian prioritas Kementerian Keuangan.** RO Prioritas Unggulan terdiri dari Bimbingan Teknis dengan target dan capaian keluaran berupa jumlah partisipan atau pemda, Kajian analisis dengan target dan capaian keluaran berupa rekomendasi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dengan target dan capaian keluaran berupa RPP atau rekomendasi, dan yang terakhir adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan target dan capaian keluaran berupa Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kajian Analisis Mandatory Spending menghasilkan Kajian Analisis Kebutuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) telah disusun Kajian terkait Indeks Maturity Pengelolaan Keuangan Daerah. RPP DBH Perkebunan Sawit telah menetapkan PP Nomor 38 Tahun 2023 Tentang DBH Perkebunan Sawit, RPP KU PDRD telah menghasilkan PP 35 Tahun 2023 Tentang KU PDRD, RPP Transfer ke Daerah telah berhasil menetapkan PP 37 Tahun 2023 Tentang Transfer ke Daerah, RPP Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah menunggu proses penetapan Presiden, dan RPP Tukinda diajukan untuk masuk substansinya ke dalam RPP Manajemen ASN (MASN). Adapun rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Output Prioritas Unggulan (PU)

Output
Prioritas
Unggulan (PU)

No	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
1	6203.FAC.302	Bimbingan Teknis Persiapan Implementasi Perda sesuai UU HKPD (PU)	217.840.000	217.545.500	99,86	450 orang	470 orang	100%
2	6203.FAC.301	Bimtek Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU)	274.271.000	262.925.600	95,86	2 daerah	17 daerah	100%
3	4779.FAC.301	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan (PU)	307.438.000	307.266.899	99,94	300 orang	632 orang	100%
4	4780.ABA.301	Kajian Analisis Mandatory Spending (PU)	137.212.000	134.720.452	98,18	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
5	6204.ABA.302	Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	160.473.000	160.419.643	99,97	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
6	4772.AAC.307	RPP DBH Perkebunan Sawit (PU)	459.741.000	455.136.359	99,00	1 PP	1 PP	100%
7	4772.AAC.301	RPP KU PDRD (PU)	908.381.000	873.568.100	96,17	1 PP	1 PP	100%
8	4772.AAC.304	RPP Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah (PU)	502.171.000	497.359.158	99,04	1 RPP	1 RPP	100%
9	4772.AAC.303	RPP Transfer ke Daerah (PU)	451.314.000	451.100.177	99,95	1 PP	1 PP	100%
10	4772.AAC.305	RPP Tukinda (PU)	299.846.000	296.536.985	98,90	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
11	4732.FAB.301	Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU)	4.290.826.000	4.098.027.432	95,51	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, DJPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2023

Uraian	2023			
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Pendapatan dan Hibah				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	271.307.012	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	0	0	271.307.012	-
Belanja Negara				
Rupiah Murni	69.380.906.000	69.026.208.000	67.646.905.815	98,00
Belanja Pegawai	4.659.057.000	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38
Belanja Barang	40.305.243.000	41.321.399.000	40.221.652.820	97,34
Belanja Modal	24.416.606.000	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97
Hibah Luar Negeri	1.968.820.000	5.620.468.000	5.214.392.723	92,78
Belanja Barang	1.968.820.000	5.620.468.000	5.214.392.723	92,78
Jumlah Belanja Negara	71.349.726.000	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61

Pada DIPA awal DJPK terdapat sumber pendanaan dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp69.380.906.000,00**, dan sumber pendanaan dari hibah dengan mekanisme Recipient Executed Trust Fund (RETF) yaitu eksekusi kegiatan dilaksanakan oleh DJPK dengan standar biaya pemerintah pusat (SBU/SBM), dan kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan DJPK. Berdasarkan Grant Agreement No. TF0B5420; Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) Phase III World Bank sebesar **US\$547.242,00**.

Kegiatan Skema *Recipient Executed Trust Fund* (RETF) yang direncanakan tahun 2023 antara lain:

- Kajian Penggunaan Pendekatan Asimetrik pada Kinerja Desentralisasi Fiskal;
- High Level Policy Meeting (Internasional Seminar on Fiscal Decentralization)*;
- Coordination and Monitoring of DGFB Reform Initiatives and Improving accountability of the DGFB Budget Management*;
- Rapid Assessment of BOK Puskesmas Direct Transfer Mechanism*;
- Workshop Implementation of Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy*;
- Capacity Building for Local Tax and Charges Reform Implementation*; dan
- Simplification of Financial Data and Reporting and TKD Chart of Accounts Harmonization*.

Terdapat tambahan kegiatan yang didanai hibah luar negeri RETF PFM-MDTF III tahun 2023, sehingga dana hibah luar negeri menjadi sebesar **Rp5.620.468.380,00** yang telah ditetapkan dalam revisi DIPA ke-2 guna implementasi kegiatan skema RETF program hibah dukungan kerjasama DJPK dengan World Bank melalui program Public Financial Management – Multi Donor Trust Fund III (PFM MDTF III) TA 2023 berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-334/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Anggaran untuk kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Kajian Penggunaan Pendekatan Asimetrik pada Kinerja Desentralisasi Fiskal	1.565.585.000
2.	<i>High Level Policy Meeting / Internasional Seminar on Fiscal Decentralization</i>	403.235.000

3.	Coordination and Monitoring of DGFB Reform Initiatives and Improving Accountability of the DGFB Budget Management	602.360.000
4.	Rapid Assessment of BOK Puskesmas Direct Transfer Mechanism	498.464.000
5.	Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy	433.640.000
6.	Capacity Building for Local Taxand Charges Reform Implementation	542.464.380
7.	Simplification of Financial Data and Reporting and TKD Chart of Accounts Harmonization	1.574.720.000
Jumlah		5.620.468.380

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023, pagu yang bersumber dari rupiah murni telah mengalami realokasi anggaran dengan mekanisme revisi DIPA, sebagai berikut:

Jenis Belanja	DIPA AWAL	DIPA TW I	DIPA TW II	DIPA TW III	DIPA TW IV
Belanja Pegawai	4.659.057.000	4.659.057.000	4.659.057.000	4.659.057.000	4.127.431.000
Belanja Barang	42.274.063.000	42.475.800.000	46.281.448.000	46.781.448.000	46.941.867.000
Belanja Modal	24.416.606.000	24.214.869.000	24.060.869.000	23.560.869.000	23.577.378.000
Total	71.349.726.000	71.349.726.000	75.001.374.000	75.001.374.000	74.646.676.000

Pada revisi DIPA TW II, terdapat penambahan belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebesar **Rp3.651.648.000,00**, dari semula sudah dialokasikan sebesar **Rp1.968.820.380,00**. Terdapat penurunan pagu dari revisi DIPA TW III ke DIPA TW IV dalam rangka penyelesaian kekurangan belanja pegawai Kementerian Keuangan TA 2023 berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ND-1319/SJ.1/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-162/PK/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan disahkan oleh surat Dirjen Anggaran Nomor S-868/AG/AG.3/2023 tanggal 15 Desember 2023. Adapun perubahan dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) dilaksanakan melalui revisi POK, sedangkan antar KRO dilaksanakan melalui revisi DIPA.

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi PNB Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp271.307.012,00**. DJPK tidak menetapkan target dalam APBN TA 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar **Rp187.642.654,00**, realisasi PNB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp83.664.358,00** atau **44,59** persen. Penerimaan semua berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp222.378.409,00** Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar **Rp35.000.761,00**, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar **Rp11.247.000,00**, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar **Rp2.680.842,00**. Besarnya realisasi PNB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per akun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Estimasi	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222.378.409
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	35.000.761
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11.247.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.680.842
Total	0	271.307.012

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi PNPB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	16.045.920	(16.045.920)	(100,00)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	222.378.409	149.446.792	72.931.617	48,80
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	35.000.761	-	35.000.761	
425791	Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Bendahara	-	15.750.000	(15.750.000)	(100,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	11.247.000	290.000	10.957.000	3.778,28
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.680.842	6.109.942	(3.429.100)	(56,12)
Total		271.307.012	187.642.654	83.664.358	44,59

Pendapatan dari
Penjualan
Peralatan dan
Mesin
Rp222.378.409,00

B.1.1 PENDAPATAN DARI PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari penjualan/ pelepasan kendaraan dinas Honda CRV dan Preggio sebesar Rp172.378.410,00 dan pelelangan TIK berupa PC, Laptop, dan printer sebesar Rp49.999.999,00.

B.1.2 PENDAPATAN DARI PEMINDAHTANGANAN BMN LAINNYA

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berasal dari penjualan bongkaran dalam rangka renovasi sebesar Rp35.000.761,00.

B.1.3 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU

Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang berasal dari setoran pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai.

Sampai dengan 31 Desember 2023, DJPK menerima Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp11.247.000,00 berasal dari Pengembalian kelebihan Uang Makan, Uang Lembur dan Makan Lembur, dan Pengembalian Pembayaran Gaji.

Penerimaan
Kembali Belanja
Pegawai TAYL
Rp11.247.000,00

B.1.4 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU

Penerimaan
Kembali Belanja
Barang TAYL
Rp2.680.842,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBP Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp2.680.842,00 berasal dari pengembalian biaya sewa mesin fotokopi digital TA 2022 sesuai BAST-0246/PPK/DJPK/2022 yang telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN nomor 5E1E12G4VFUQMHUK tanggal 10 Januari 2023.

B.2 BELANJA

Pagu Anggaran TA
2023 sebesar
Rp74.646.676.000,00

Pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp74.646.676.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.768.200.000,00 atau 36,02 persen dari pagu anggaran TA 2022 sebesar Rp54.878.476.000,00 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-40/PK/2023 tanggal 21 Maret 2023, pagu DJPK mengalami *refocussing* dan realokasi dalam rangka pemenuhan akan pengadaan seragam Kemenkeu dan kebutuhan pendanaan baru kegiatan DJPK pada tahun anggaran 2023. Sumber realokasi anggaran revisi DIPA ke-1 TA 2023 antara lain:

- Sumber Dana Rupiah Murni (RM).
- Diluar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional.
- Diutamakan kegiatan non Prioritas (PN/PU).
- Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 5 Maret 2023.
- Kegiatan yang semula di Hotel kemudian dialihkan ke Gedung Kemenkeu.
- Kegiatan Bimtek dan Perjadin yang dipertimbangkan dapat dilaksanakan secara *hybrid* dengan tetap mempertahankan capaian output.
- Kegiatan lain yang dapat ditunda pelaksanaannya.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan Nomor ND-10/MK.1/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Pemenuhan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian Keuangan TA 2023, nilai *Automatic Adjustment* (AA) yang telah dipenuhi oleh DJPK adalah sebesar Rp995.605.000,00. Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan pendanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang sangat mendesak dan strategis, yaitu pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terdapat beberapa peraturan turunan yang memerlukan sosialisasi secara intensif kepada pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam kerangka Kemenkeu Satu. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan unit eselon I lain dan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan, serta akan mengikutsertakan Anggota DPR RI dari Komisi XI DPR. Berkenaan hal tersebut DJPK mengajukan permohonan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* (AA) DJPK TA 2023 melalui Nota Dinas Nomor ND-911/PK.1/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp995.605.000,00.

LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

Realisasi Belanja
sebesar
Rp72.861.298.538,00

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp72.861.298.538,00** atau **97,61** persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar **Rp74.646.676.000,00** setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar **Rp304.873.885,00**.

Tabel 12 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/2
Rupiah Murni	69.026.208.000	67.902.520.849	255.615.034	67.646.905.815	98,00
Belanja Pegawai	4.127.431.000	3.857.196.000	2.964.000	3.854.232.000	93,38
Belanja Barang	41.321.399.000	40.474.303.854	252.651.034	40.221.652.820	97,34
Belanja Modal	23.577.378.000	23.571.020.995	-	23.571.020.995	99,97
Hibah Luar Negeri	5.620.468.000	5.263.651.574	49.258.851	5.214.392.723	92,78
Belanja Barang	5.620.468.000	5.263.651.574	49.258.851	5.214.392.723	93
Jumlah Belanja Negara	74.646.676.000	73.166.172.423	304.873.885	72.861.298.538	97,61

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp19.240.299.490,00** atau **35,88** persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2022 sebesar **Rp53.620.999.048,00**. Namun, secara persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari **97,71** persen di TA 2022 menjadi **97,61** persen di TA 2023.

Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

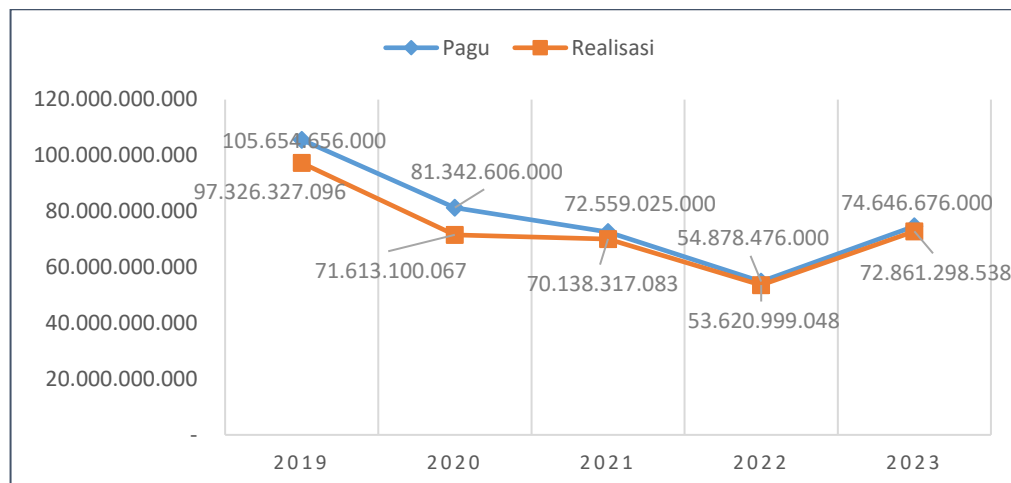
Uraian	2023		%	2022		%
	Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14
Belanja Barang	46.941.867.000	45.436.045.543	96,79	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51
Belanja Modal	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13
Total	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71

Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2019 - 2023

2019	105.654.656.000	97.326.327.096	92,12
2020	81.342.606.000	71.613.100.067	88,04
2021	72.559.025.000	70.138.317.083	96,66
2022	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71
2023	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 - 2023



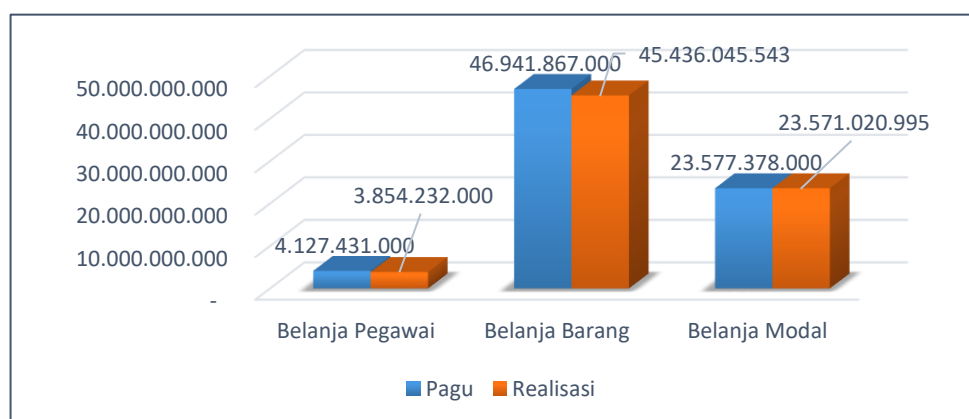
Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38%
Belanja Barang	46.941.867.000	45.436.045.543	96,79%
Belanja Modal	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97%
Total	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61%

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2023 sebagaimana tampak pada tabel dan grafik berikut.

Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023



Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program, Kegiatan, dan sumber dana meliputi 1 Fungsi, yaitu **Fungsi Pelayanan Umum**, 1 Sub Fungsi, yaitu **Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri**, yang kemudian terbagi menjadi 3 program yaitu **Program Pengelolaan Belanja Negara (CB)** sebesar **Rp14.773.680.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp14.249.232.491,00**, **Program Kebijakan Fiskal (CE)** sebesar **Rp3.247.868.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp3.137.711.930,00**,

Program Belanja terdiri dari Program Pengelolaan Belanja Negara, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp56.625.128.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.474.354.117,00.

Tabel 16 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan, dan Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
01	Fungsi Pelayanan Umum	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61
01.01	Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri			
CB	Program Pengelolaan Belanja Negara			
	Rupiah Murni			
4779	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	4.611.748.000	4.458.827.498	96,68
4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	872.419.000	834.718.398	95,68
4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	1.328.981.000	1.322.054.682	99,48
4782	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	391.349.000	380.538.323	97,24
6203	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	3.272.955.000	3.155.301.910	96,41
6204	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	931.807.000	889.633.781	95,47
6205	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	463.497.000	439.693.854	94,86
	Jumlah Belanja Program CB Rupiah Murni	11.872.756.000	11.480.768.446	96,70
	Hibah LN			
4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	2.900.924.000	2.768.464.045	95,43
	Jumlah Belanja Program CB Hibah LN	2.900.924.000	2.768.464.045	95,43
	Jumlah Belanja Program CB	14.773.680.000	14.249.232.491	96,45
CE	Program Kebijakan Fiskal			
	Rupiah Murni			
4772	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	2.705.404.000	2.627.767.135	97,13
	Jumlah Belanja Program CE Rupiah Murni	2.705.404.000	2.627.767.135	97,13
	Hibah LN			
4772	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	542.464.000	509.944.795	94,01
	Jumlah Belanja Program CE Hibah LN	542.464.000	509.944.795	94,01
	Jumlah Belanja Program CE	3.247.868.000	3.137.711.930	96,61
WA	Program Dukungan Manajemen			
	Rupiah Murni			
4728	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	41.671.776.000	41.216.828.852	98,91
4729	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	779.343.000	773.576.481	99,26
4730	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6.171.021.000	5.828.217.481	94,44
4731	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Interna	141.818.000	137.911.560	97,25
4732	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	5.474.927.000	5.388.369.966	98,42
6609	Legislasi dan Litigasi	209.163.000	193.465.894	92,50
	Jumlah Belanja Program WA Rupiah Murni	54.448.048.000	53.538.370.234	98,33
	Hibah LN			
4728	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	602.360.000	523.473.966	86,90
4732	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	1.574.720.000	1.412.509.917	89,70
	Jumlah Belanja Program WA Hibah LN	2.177.080.000	1.935.983.883	88,93
	Jumlah Belanja Program WA	56.625.128.000	55.474.354.117	97,97
	Jumlah Belanja Program Rupiah Murni	69.026.208.000	67.646.905.815	98,00
	Jumlah Belanja Program Hibah LN	5.620.468.000	5.214.392.723	92,78
	Jumlah Belanja	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3.854.232.000,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pagu belanja pegawai pada DIPA sebesar Rp4.127.431.000,00. Implementasi pemusatan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dimulai pada Bulan Mei TA 2022 seiring ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.01/2022 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/KMK.01/2022. Adapun komponen gaji yang dipusatkan ke Sekretariat Jenderal meliputi Gaji Induk, Gaji Ketiga Belas, Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, Tunjangan Hari Raya, Gaji Terusan, dan Uang Muka/Persekot Gaji.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 meliputi: Belanja Uang Makan PNS dan Belanja Lembur. Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

sebesar Rp3.854.232.000,00 atau 93,38 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.817.555.310,00 atau 71,81 persen. Diantara realisasi Belanja Pegawai tersebut, terdapat kenaikan realisasi Belanja Lembur sebesar 17,37 persen. Pelaksanaan lembur dan pengajuan uang lembur sudah terintegrasi bertahap dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penggunaan Modul Pengelolaan Lembur pada e-Kemenkeu dan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2023 tanggal 7 Maret 2023. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2023 sebanyak 530 orang. Rincian Belanja Pegawai TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Uang Makan PNS	3.810.583.000	3.643.055.000	95,60
Belanja Uang Lembur	316.848.000	211.177.000	66,65
Total	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38

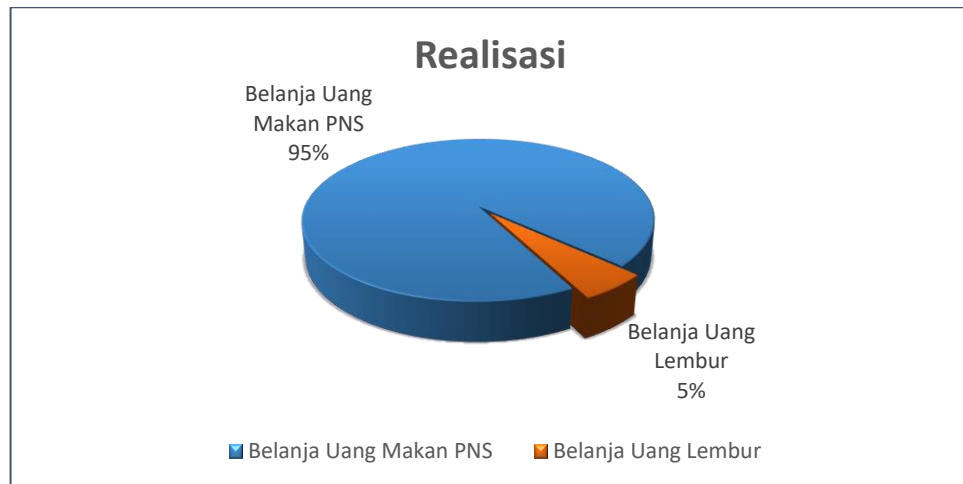
Perbandingan antara realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Gaji Pokok PNS		7.285.701.860	-7.285.701.860	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS		104.709	-104.709	(100,00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		499.128.250	-499.128.250	(100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS		154.596.766	-154.596.766	(100,00)
Belanja Tunj. Struktural PNS		421.980.000	-421.980.000	(100,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS		282.760.000	-282.760.000	(100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS		10.673.646	-10.673.646	(100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS		407.217.660	-407.217.660	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	3.646.019.000	4.209.488.000	-563.469.000	(13,39)
Belanja Tunjangan Umum PNS		238.610.000	-238.610.000	(100,00)
Belanja Uang Lembur	211.177.000	179.922.710	31.254.290	17,37
Jumlah Belanja Bruto	3.857.196.000	13.690.183.601	-9.832.987.601	(71,83)
Pengembalian Belanja	2.964.000	18.396.291	-15.432.291	(83,89)
Jumlah Belanja Netto	3.854.232.000	13.671.787.310	-9.817.555.310	(71,81)

Komposisi Belanja Pegawai TA 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2023

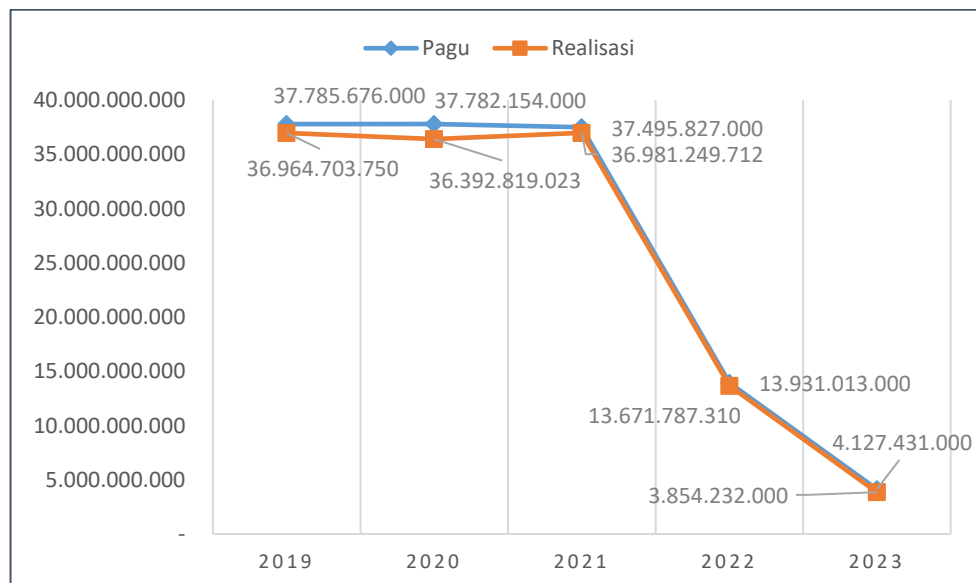


Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2023

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	37.785.676.000	36.964.703.750	97,83
2020	37.782.154.000	36.392.819.023	96,32
2021	37.495.827.000	36.981.249.712	98,63
2022	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14
2023	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38

Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2023



B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja
Barang

Rp45.436.045.543,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.436.045.543,00 yang berarti 96,79 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp46.941.867.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.787.725.255,00 atau 23,98 persen. Kenaikan signifikan belanja barang terjadi pada komponen belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.

Rincian Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 20 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	7.755.730.000	7.618.432.558	98,23
Belanja Barang Non Operasional	3.962.814.000	3.748.912.744	94,60
Belanja Barang Persediaan	950.000.000	949.393.357	99,94
Belanja Jasa	6.462.231.000	6.213.780.961	96,16
Belanja Pemeliharaan	7.094.917.000	6.940.692.120	97,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.147.420.000	18.422.412.009	96,21
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.568.755.000	1.542.421.794	98,32
Total	46.941.867.000	45.436.045.543	96,79

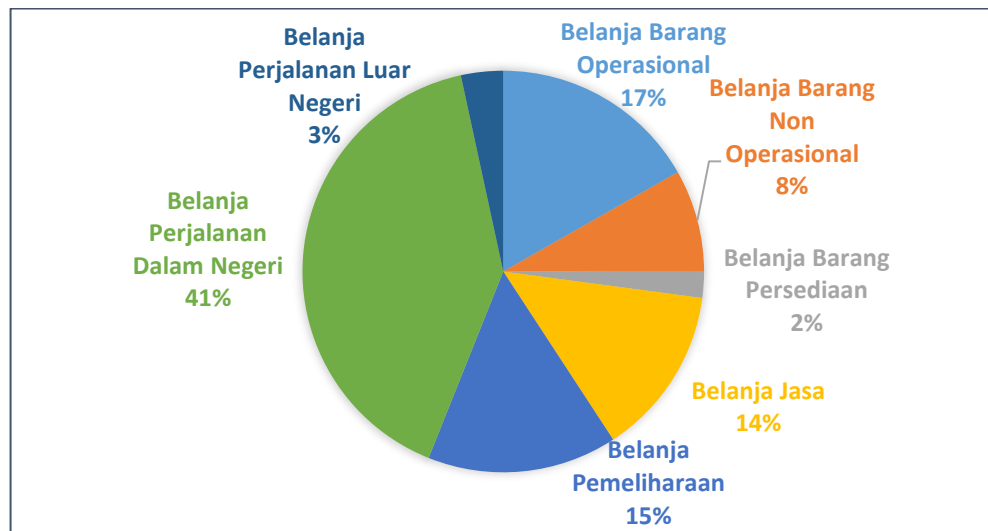
Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	7.618.432.558	7.435.734.140	182.698.418	2,46
Belanja Barang Non Operasional	3.750.544.744	3.004.590.154	745.954.590	24,83
Belanja Barang Persediaan	949.393.357	788.949.274	160.444.083	20,34
Belanja Jasa	6.213.780.961	5.422.992.381	790.788.580	14,58
Belanja Pemeliharaan	6.940.692.120	5.655.733.158	1.284.958.962	22,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	18.697.487.682	14.505.910.279	4.191.577.403	28,90
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.567.624.006	-	1.567.624.006	-
Jumlah Belanja Bruto	45.737.955.428	36.813.909.386	8.924.046.042	24,24
Pengembalian Belanja	301.909.885	165.589.098	136.320.787	82,32
Jumlah Belanja Netto	45.436.045.543	36.648.320.288	8.787.725.255	23,98

Komposisi Belanja Barang TA 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 5 Komposisi Belanja Barang

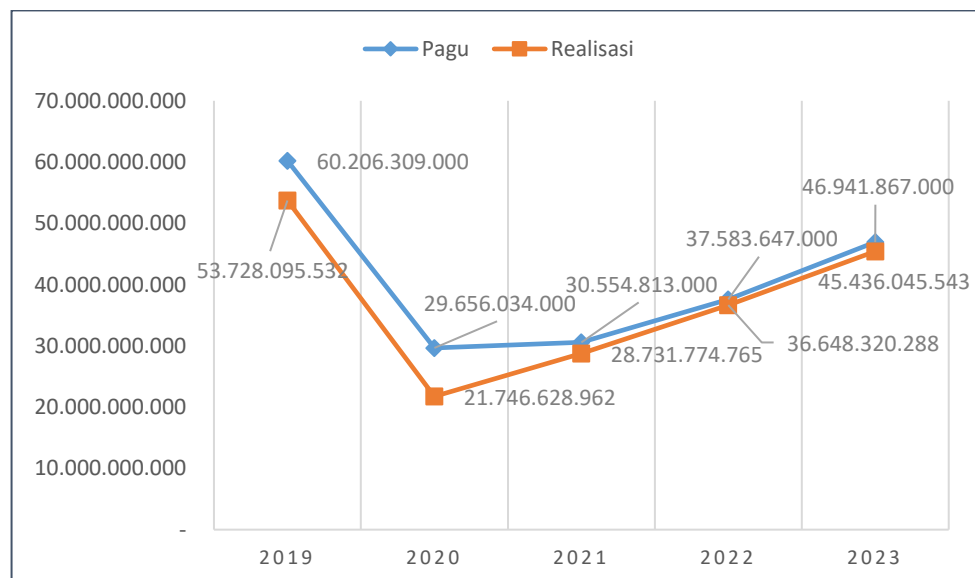


Perbandingan persentase realisasi belanja barang TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2023

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	60.206.309.000	53.728.095.532	89,24
2020	29.656.034.000	21.746.628.962	73,33
2021	30.554.813.000	28.731.774.765	94,03
2022	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51
2023	46.941.867.000	45.436.045.543	96,79

Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2023



B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal

Rp23.571.020.995,00

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terkait dengan pembentukan aset, baik itu aset tetap, aset lainnya, ataupun terkait kapitalisasi aset tetap. Terdapat proses pendetilan aset setelah transaksi belanja modal terjadi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.571.020.995,00 atau 99,97 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp23.577.378.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.270.129.545,00 atau 614,08 persen.

Kenaikan signifikan disebabkan karena pagu belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan Server dan Storage DJPK. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan peremajaan infrastruktur Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dimana saat ini SIKD dan aplikasi pendukungnya sebagian besar berjalan diperangkat server yang sudah tidak memiliki dukungan (*End of Life/EOL*) dan tidak tersedia lagi suku cadangnya di pasaran (*End of Support Life/EOSL*). Perangkat Server dan Storage tersebut telah beroperasi baik di Smart DC Kemenkeu di Jakarta maupun DRC Kemenkeu di Kota Balikpapan dan digunakan sebagai infrastruktur utama yang mendukung SIKD.

Selain itu, belanja modal peralatan dan mesin juga untuk pengadaan peralatan yang menunjang fasilitas perkantoran seperti bak sampah, camera digital, trolley, bracket TV, mesin pemotong kertas, filling cabinet, splitter, soundcard recording, dispenser, penghancur kertas, karpet, kursi baca, clip on wireless microphone, meja sisi, televisi, id card printer, head set, speaker, LCD projector, lemari es, water heater, portable harddisk, dan alat video conference.

Belanja modal lainnya digunakan untuk pembelian koleksi buku perpustakaan, kegiatan Renovasi Gedung Radius Prawiro Set Up ABW, predesain renovasi ruang rapat gazebo, lisensi, dan software komputer.

Rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 23 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	21.541.329.000	21.535.344.800	99,97
Belanja Modal Lainnya	2.036.049.000	2.035.676.195	99,98
Total	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97

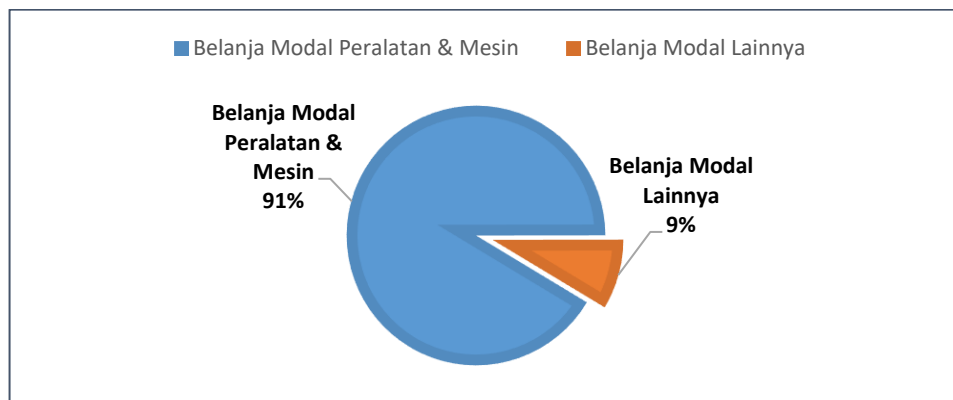
Perbandingan antara realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
B. Modal Peralatan dan Mesin	21.535.344.800	1.158.389.226	20.376.955.574	1759,08
Belanja Modal Lainnya	2.035.676.195	2.142.502.224	- 106.826.029	(4,99)
Jumlah Belanja Bruto	23.571.020.995	3.300.891.450	20.270.129.545	614,08
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Jumlah Belanja Netto	23.571.020.995	3.300.891.450	20.270.129.545	614,08

Komposisi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2023

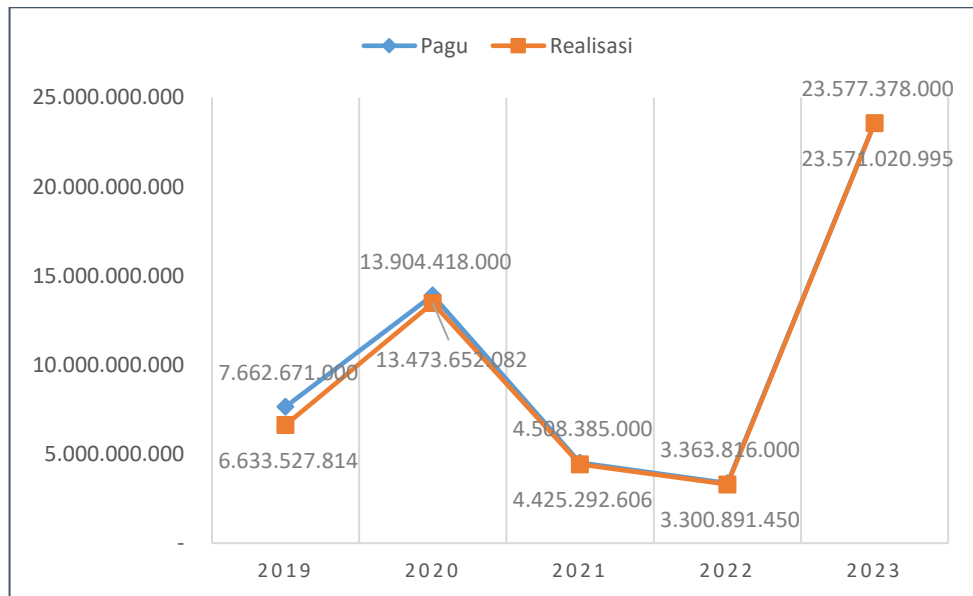


Perbandingan persentase realisasi belanja modal TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 – 2023

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	7.662.671.000	6.633.527.814	86,57
2020	13.904.418.000	13.473.652.082	96,90
2021	4.508.385.000	4.425.292.606	98,16
2022	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13
2023	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97

Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 - 2023



B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA

Pengembalian Belanja Negara Rp304.873.885,00

Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas Umum Negara dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dengan alasan apapun. Pengembalian Belanja berasal dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pengembalian Belanja tahun anggaran berjalan dibukukan sesuai dengan akun belanjanya.

Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp304.873.885,00 dan Rp183.985.389,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp120.888.496,00 atau 65,71 persen. Rincian Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian Pengembalian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.964.000	13.788.581	-10.824.581	-78,50
5122	Belanja Uang Lembur	0	4.607.710	-4.607.710	-100,00
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai		2.964.000	18.396.291	-15.432.291	-83,89
5211	Belanja Barang Operasional	0	0	0	
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.632.000	485.000	1.147.000	236,5
5218	Belanja Barang Persediaan	0	0	0	
5221	Belanja Jasa	0	164.000	-164.000	-100,00
5231	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	275.075.673	164.940.098	110.135.575	66,77
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	25.202.212	0	25.202.212	
Jumlah pengembalian Belanja Barang		301.909.885	165.589.098	136.320.787	82,32
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	
5361	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pengembalian Belanja Modal		0	0	0	
Total		304.873.885	183.985.389	120.888.496	65,71

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Perbandingan
Neraca per 31
Desember 2023
dan 2022

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 27 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Perkiraan	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset	26.812.721.118	16.052.801.408	10.759.919.710	67,03
Kewajiban	369.826.268	5.830.832	363.995.436	6.242,60
Ekuitas	26.442.894.850	16.046.970.576	10.395.924.274	64,78

Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut.

C.1 ASET

Aset
Rp26.812.721.118,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp26.812.721.118,00 dan Rp16.052.801.408,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.759.919.710,00 atau 67,03 persen. Kenaikan nilai aset pembelian peralatan dan mesin, server, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan transfer masuk.

Tabel 28 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
26.812.721.118	16.052.801.408	10.759.919.710	67,03

Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 29 Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

Perkiraan	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.331.829.540	1.147.136.743	184.692.797	16,10
Aset Tetap	23.501.914.500	12.380.832.127	11.121.082.373	89,82
Aset Lainnya	1.978.977.078	2.524.832.538	-545.855.460	(21,62)
Jumlah Aset	26.812.721.118	16.052.801.408	10.759.919.710	67,03

C.1.1 ASET LANCAR

C.1.1.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak
Rp65.722.182,00

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara selain Pajak.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp65.722.182,00 dan Rp53.414.748,00 merupakan piutang yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak yang belum dilunasi/disetor ke kas negara sampai dengan tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Klasifikasi Piutang	Debitor	Saldo Awal	Perubahan (+/-)	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penggolongan				Nilai Agunan Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PT Aek Sibundong Nauli	39.785.106	-	39.785.106	-	-	-	39.785.106	-
	Sdr. Sanjaya Wiratama	10.948.800	-	10.948.800	-	-	-	10.948.800	-
	PT Setiawan Kumalagiri	2.680.842	(2.680.842)	-	-	-	-	-	-
	CV. Qolbi Karya	-	14.988.276	14.988.276	14.988.276	-	-	-	-
Jumlah Piutang		53.414.748		65.722.182	14.988.276	-	-	50.733.906	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih								50.808.847	

Terdapat pengurangan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp2.680.842,00 berasal dari nilai SPNP yaitu selisih nilai BAST Final dengan BAST Bank Garansi atas nomor kontrak SP-0094/PPK/DJPK/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan addendum nomor SP-0028/PPK/DJPK/2022 tanggal 27 April 2022 tentang jasa sewa mesin *fotocopy* digital

Ditjen Perimbangan Keuangan TA 2022 yang telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN nomor 5E1E12G4VFUQMHUK tanggal 10 Januari 2023.

Disamping itu Piutang Lainnya sebesar **Rp14.988.276,00** merupakan Piutang Lainnya berasal dari pengembalian belanja modal atas kekurangan volume pekerjaan renovasi set up ruang ABW untuk Lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro. Telah ditagihkan kepada penyedia jasa melalui surat S-2/PK.143/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan telah dibayar ke Kas Negara dengan kode billing Nomor 820240503363587 dan NTPN 5C64761QV3U7OM03 pada tanggal 3 Mei 2024.

C.1.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp50.808.847,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp50.808.847,00** dan **Rp50.747.310,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar **Rp50.808.847,00**, terdiri dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang yang telah diserahkan ke PUPN dan berstatus piutang macet dan Piutang atas Pengembalian Belanja Modal atas kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang Set Up ABW lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro yang dikategorikan lancar karena sudah dibayar pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana Tabel 30.

Mengenai Piutang Tidak Tertagih Kategori Macet, DJPK telah berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V melalui Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ND-968/SJ.1/2022 tanggal 25 Agustus 2022 hal Konfirmasi Status dan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara pada unit DJPK yang telah diserahkan Pengurusannya ke PUPN. KPKNL V telah menerbitkan Surat Paksa kepada PT. Aek Sibundong Nauli dengan Lap.SP-98/WKN.07/KNL.05.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

C.1.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp1.316.916.205,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar berupa Persediaan menggunakan data persediaan per tanggal 31 Desember 2023. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp1.316.916.205,00** dan **Rp1.144.469.305,00**. Kenaikan nilai persediaan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan barang persediaan di gudang yang belum dilakukan permintaan barang.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 per jenis persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
117111	Barang Konsumsi	1.268.721.226	1.068.668.797	200.052.429	18,72
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	48.194.979	75.800.508	-27.605.529	(36,42)
Total		1.316.916.205	1.144.469.305	172.446.900	15,07

Tabel 32 Tabel Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Awal 1 Januari 2023	1.144.469.305
Mutasi Tambah	1.042.096.322
Pembelian	1.040.643.682
Hasil Opname Fisik	1.452.640
Mutasi Kurang	869.649.422
Habis Pakai	869.649.422
Saldo per 31 Desember 2023	1.316.916.205

Pada Semester I Tahun 2023 telah dilakukan penghapusan persediaan usang sehingga saldo Persediaan Usang/Rusak per 31 Desember 2023 adalah 0 (nihil).

C.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap

Rp23.501.914.500,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/ dalam kegiatan operasional entitas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.501.914.500,00 dan Rp12.380.832.127,00. Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 33 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	122.508.086.200	103.764.804.143	18.743.282.057	18,06
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	1.427.595.200	0	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	669.888.518	651.888.518	18.000.000	2,76
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.705.508	0	64.705.508	
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-100.969.935.871	-93.304.051.953	-7.665.883.918	8,22
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-198.425.055	-159.403.781	-39.021.274	24,48
Jumlah		23.501.914.500	12.380.832.127	11.121.082.373	89,82

Posisi aset tetap pada neraca antara Modul GLP dan Modul Aset Tetap pada SAKTI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Modul GLP	Modul Aset	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	122.508.086.200	122.508.086.200	0	0,00
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	1.427.595.200	0	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	669.888.518	669.888.518	0	0,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.705.508	64.705.508	0	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-100.969.935.871	-100.969.935.871	0	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-198.425.055	-198.425.055	0	0,00
Jumlah		23.501.914.500	23.501.914.500	0	0,00

C.1.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin

Rp122.508.086.200,00

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp122.508.086.200,00 dan Rp103.764.804.143,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp18.743.282.057,00 atau 18,06 persen.

Tabel 35 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	122.508.086.200	103.764.804.143	18.743.282.057	18,06
Jumlah	122.508.086.200	103.764.804.143	18.743.282.057	18,06

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.205.244.800 terdiri dari:

- pembelian Server, Storage Modul Disk, dan peralatan untuk operasional kantor.
- transfer masuk Lap Top dan P.C Unit Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi.

Mutasi kurang sebesar Rp3.461.962.743,00 berupa penghentian penggunaan terhadap kendaraan dinas dan Peralatan Komputer yang dilakukan penghapusan dengan cara penjualan/ lelang, transfer keluar terhadap kendaraan dinas yang dilakukan pengalihan penggunaan, dan hibah berupa kendaraan dinas dan P.C Unit.

Tabel 36 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2023	103.764.804.143
Mutasi Tambah	22.205.244.800
Pembelian	21.535.344.800
Transfer Masuk	669.900.000
Mutasi Kurang	3.461.962.743
Saldo 31 Desember 2023	122.508.086.200
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	100.969.935.871
Nilai Buku per 31 Desember 2023	21.538.150.329

C.1.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan

Rp1.427.595.200,00

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.427.595.200,00 dan Rp1.427.595.200,00 yang merupakan aset tetap berupa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen. Rumah Negara atau rumah dinas tersebut berlokasi di Jalan Cipete V No. 8a, RT.1/RW.4, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410.

C.1.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya

Rp669.888.518,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp669.888.518,00 dan Rp651.888.518,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp18.000.000,00 atau 2,76 persen. Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan Tercetak serta Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

C.1.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan

Rp64.705.508,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) DJPK per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.705.508,00 seluruhnya merupakan aset tetap lainnya dalam pengerjaan, yaitu berupa pradesain ruang rapat. Mutasi tambah KDP terdiri dari Perolehan KDP sebesar Rp64.705.508,00.

C.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(101.168.360.926,00) dan Rp(93.463.455.734,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	122.508.086.200	100.969.935.871	21.538.150.329
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	198.425.055	1.229.170.145
3	Aset Tetap Lainnya	669.888.518	-	669.888.518
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.705.508	-	64.705.508
Jumlah		124.670.275.426	101.168.360.926	23.501.914.500

C.1.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.978.977.078,00 dan Rp2.524.832.538,00. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp545.855.460,00 atau 21,62 persen karena meningkatnya akumulasi penyusutan pada aset tidak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Tabel 38 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Aset Lainnya	1.978.977.078	2.524.832.538	(545.855.460)	(21,62)
Jumlah	1.978.977.078	2.524.832.538	-545.855.460	-21,62

C.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.672.409.204,00 dan Rp9.891.147.694,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud (ATB) pada DJPK berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 39 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	9.800.803.988	9.060.922.478	739.881.510	8,17
Lisensi	871.605.216	830.225.216	41.380.000	4,98
Jumlah	10.672.409.204	9.891.147.694	781.261.510	7,90

C.1.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp372.809.751,00

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp372.809.751,00 dan Rp0. Pencatatan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya ditujukan atas pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya yang pembayarannya menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme RPATA terdiri dari pengisian dana RPATA, pembayaran kepada pihak ketiga, dan penihilan RPATA.

Tabel 40 Pelaksanaan RPATA

No	Jenis Transaksi	Dok. Sumber	Uraian Kegiatan	Nilai	Keterangan
1.	Pengisian RPATA	SPP 1470	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor SP-137/PPK/DJPK/2022 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Mesin Fotokopi DJPK TA 2023, BAPP-0203/PPK/DJPK/2023 tgl 04-12-2023	Rp54.390.000,00	-
2.	Pengisian RPATA	SPP 1490	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor SP-0001/PPK/DJPK/2023 untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor DJPK, BAPP: BAPP-0201/PPK/DJPK/2023 Tgl 1 Desember 2023	Rp185.022.726,00	Merupakan angka estimasi karena kontrak harga satuan
3.	Pengisian RPATA	SPP 1481	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor SPK-0116/PPK/DJPK/2023 untuk Jasa Pemeliharaan Ruang Rapat Kalimantan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Rp133.397.025,00	-

			Gedung Radius Prawiro Lantai 9 TA 2023		
4.	Pembayaran kepada Pihak Ketiga	SPP 00001T	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Ruang Rapat Kalimantan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 9 TA 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0236/PPK/DJPK/2023 Tanggal 27-12-2023	Rp133.397.025,00	Dilakukan pada tahun 2024
5.	Pembayaran kepada Pihak Ketiga	SPP 00002T	Pembayaran Belanja Barang Termin XII Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Mesin Fotokopi Digital DJPK TA 2023sesuai Kontrak SP-137/PPK/DJPK/2022 tgl 27-12-2022, BAST/BAPP Nomor BAST-0238/PPK/DJPK/2023 tgl 31-12-2023	Rp54.390.000,00	Dilakukan pada tahun 2024
6.	Pembayaran kepada Pihak Ketiga	SPP 00003T	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor DJPK sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0239/PPK/DJPK/2023 Tanggal 31-12-2023	Rp179.907.342,00	Dilakukan pada tahun 2024
7.	Penihilan RPATA	SPP 00004T	Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor SP-0001/PPK/DJPK/2023 untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor DJPK Tanggal 5 Januari 2024 dengan SP2D Nomor 240190301000044 tanggal 9 Januari 2024	Rp5.115.384,00	Dilakukan pada tahun 2024

C.1.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp948.603.155,00

Jumlah Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp948.603.155,00 dan Rp448.631.261,00. Aset Lain-lain tersebut merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK serta dalam proses penghapusan dari BMN. Pada tahun 2023 DJPK telah melaksanakan lelang BMN untuk laptop, printer, dan kendaraan dinas sebagai tindak lanjut dari aset yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK. Sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat barang yang masih dalam proses penghapusan karena terdapat penambahan barang yang diusulkan untuk dihapuskan pada akhir tahun 2023.

Tabel 41 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	948.603.155	448.631.261	499.971.894	111,44
Total	948.603.155	448.631.261	499.971.894	111,44

Mutasi Aset Lain-Lain selama tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 42 Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

Saldo Awal 1 Januari 2023	448.631.261
Mutasi Masuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1.594.071.243
Mutasi Keluar Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1.094.099.349
Saldo 31 Desember 2023	948.603.155

C.1.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp10.014.845.032,00

Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp10.014.845.032,00 dan Rp7.814.946.417,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.199.898.615,00 atau 28,15 persen. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 43 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	948.603.155	874.603.155	74.000.000
2	Software	9.800.803.988	8.826.821.786	973.982.202
3	Lisensi	871.605.216	313.420.091	558.185.125
Jumlah		11.621.012.359	10.014.845.032	1.606.167.327

C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp369.826.268,00

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp369.826.268,00 dan Rp5.830.832,00.

Tabel 44 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)
369.826.268	5.830.832	363.995.436

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 merupakan Utang sebesar Rp369.826.268,00. Utang Kepada Pihak Ketiga berasal dari reklasifikasi atas Utang Yang Belum Diterima Tagihannya yang terbentuk dari perekaman BAST RPATA dan Beban Langganan telepon Bulan Desember 2023 yang telah dibayar pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp2.131.901,00, dimana penyelesaian pembayaran melalui RPATA dilakukan pada tahun berikutnya. BAST menggunakan mekanisme RPATA sebagai berikut:

1. BAST-0236/PPK/DJPK/2023 tanggal 27-12-2023 atas Jasa Pemeliharaan Ruang Rapat Kalimantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 9 TA 2023 sebesar Rp133.397.025,00.
2. BAST-0238/PPK/DJPK/2023 tanggal 31-12-2023 atas Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Mesin Fotokopi Digital DJPK TA 2023 sesuai Kontrak SP-137/PPK/DJPK/2022 tgl 27-12-2022 Termin XII sebesar Rp54.390.000,00.
3. BAST-0239/PPK/DJPK/2023 tanggal 31-12-2023 atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor DJPK sebesar Rp179.907.342,00.

3 EKUITAS

Ekuitas
Rp26.442.894.850,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.442.894.850,00 bila dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2022 yaitu Rp16.046.970.576,00, mengalami kenaikan sebesar Rp10.395.924.274,00 atau 64,78 persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK

Pendapatan PNPB Jumlah Pendapatan PNPB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar *Rp0,00* dan *Rp16.045.920,00*. Rincian PNPB disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 45 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	16.045.920	-16.045.920	(100,00)
Jumlah	0	16.045.920	-16.045.920	0,00

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai
Rp3.853.583.000,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar *Rp3.853.583.000,00* dan *Rp13.445.841.459,00*. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar *Rp9.592.258.459,00* atau *71,34* persen. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 46 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS		7.266.990.520	-7.266.990.520	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS		103.047	-103.047	(100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS		498.361.980	-498.361.980	(100,00)
Beban Tunj. Anak PNS		154.596.766	-154.596.766	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS		421.440.000	-421.440.000	(100,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS		281.690.000	-281.690.000	(100,00)
Beban Tunj. PPh PNS		10.673.646	-10.673.646	(100,00)
Beban Tunj. Beras PNS		407.072.820	-407.072.820	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	3.642.406.000	3.993.079.000	-350.673.000	(8,78)
Beban Tunj. Umum PNS		236.518.680	-236.518.680	(100,00)
Beban Uang Lembur	211.177.000	175.315.000	35.862.000	20,46
Jumlah	3.853.583.000	13.445.841.459	-9.592.258.459	-71,34

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp743.613.328,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp743.613.328,00 dan Rp690.101.447,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.511.881,00 atau 7,75 persen. Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang persediaan oleh pegawai dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 47 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Persediaan	743.613.328	690.101.447	53.511.881	7,75
Jumlah	743.613.328	690.101.447	53.511.881	7,75

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan
Jasa
Rp22.961.090.748,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.961.090.748,00 dan Rp19.052.980.883,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.908.109.865,00 atau 20,51 persen. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	6.018.030.158	5.337.372.088	680.658.070	12,75
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat	220.896.500	229.405.375	-8.508.875	(3,71)
Beban Honor Operasional Satker	574.548.000	546.730.000	27.818.000	5,09
Beban Barang Operasional Lainnya	796.799.400	129.975.450,00	666.823.950	513,04
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	8.158.500	1.192.251.227	-1.184.092.727	(99,32)
Beban Bahan	3.115.027.994	2.027.933.572	1.087.094.422	53,61
Beban Honor Output Kegiatan	309.000.000	664.730.000	-355.730.000	(53,51)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	324.884.750	311.441.582	13.443.168	4,32
Beban Langganan Listrik		5.665.982	-5.665.982	(100,00)
Beban Langganan Telepon	195.930.336	184.979.497	10.950.839	5,92
Beban Daya dan Jasa Lainnya	1.751.590	16.604.260,00	-14.852.670	(89,45)
Beban Jasa Konsultan	5.521.876.666	3.307.984.297	2.213.892.369	66,93
Beban Sewa	1.232.385.318	1.432.858.626	-200.473.308	(13,99)
Beban Jasa Profesi	1.722.187.500	2.252.610.000	-530.422.500	(23,55)
Beban Jasa Lainnya	2.919.614.036	1.328.832.778	1.590.781.258	119,71
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	83.606.149	-83.606.149	(100,00)
Jumlah	22.961.090.748	19.052.980.883	3.908.109.865	20,51

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban

Pemeliharaan

Rp6.968.909.865,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal (termasuk beban persediaan bahan untuk pemeliharaan).

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.968.909.865,00 dan Rp5.761.926.005,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.206.983.860,00 atau 20,95 persen. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	939.105.838	1.449.237.972	-510.132.134	(35,20)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	72.600.659	92.996.880	-20.396.221	(21,93)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.197.182.594	4.052.381.461	1.144.801.133	28,25
Beban Pemeliharaan Jaringan	20.437.320	0	20.437.320	
Beban Pemeliharaan Lainnya	615.000.000	0	615.000.000	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	124.583.454	167.309.692	-74.433.291	(44,49)
Jumlah	6.968.909.865	5.761.926.005	1.206.983.860	20,95

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan

Dinas

Rp19.964.833.803,00

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.964.833.803,00 dan Rp14.340.970.181,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.623.863.622,00 atau 39,2 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.368.034.298	5.216.057.903	4.151.976.395	79,60
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.400.000	115.078.000	-25.678.000	(22,31)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.700.237.000	6.514.291.708	1.185.945.292	18,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.264.740.711	2.495.542.570	-1.230.801.859	(49,32)
Beban Perjalanan Dinas - Luar Negeri	1.542.421.794	-	1.542.421.794	
Jumlah	19.964.833.803	14.340.970.181	5.623.863.622	39,22

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp12.552.078.331,00

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.552.078.331,00 dan Rp9.490.703.852,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.061.374.479,00 atau 32,26 persen. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.813.130.336	7.509.965.979	3.303.164.357	43,98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.021.274	39.021.274	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	14.643.889	(14.643.889)	(100,00)
Jumlah Penyusutan	10.852.151.610	7.563.631.142	3.288.520.468	43,48
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.699.926.721	1.927.072.710	-227.145.989	(11,79)
Jumlah Amortisasi	1.699.926.721	1.927.072.710	(227.145.989)	(11,79)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.552.078.331	9.490.703.852	3.061.374.479	32,26

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp61.537,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp61.537,00 dan Rp(17.146,00). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 52 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	61.537	-17.146	78.683	(458,90)
Jumlah	61.537	-17.146	78.683	-458,90

D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp268.626.170,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	257.379.170	149.446.792
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	257.379.170	149.446.792
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.247.000	16.040.000
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	354.384.743
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	11.247.000	-338.344.743
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	268.626.170	-188.897.951

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp268.626.170,00 berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp222.378.409,00 dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp35.000.761,00 serta Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp11.247.000,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp16.046.970.576,00

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.046.970.576,00 dan Rp21.664.466.143,00. Nilai ekuitas awal berasal dari nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2023.

Tabel 54 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal

2023	2022	Kenaikan/(Penurunan)
16.046.970.576	21.664.466.143	-5.617.495.567

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp(66.775.544.442,00)

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(66.775.544.442,00) dan Rp(62.955.358.712,00).

Tabel 55 Perbandingan Surplus/Defisit LO

2023	2022	Kenaikan/(Penurunan)
-66.775.544.442	-62.955.358.712	-3.820.185.730

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.988.276 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi ini merupakan koreksi atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang telah diserahkan ke Sekretariat Jenderal, karena terdapat kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang set up ABW lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro. Pencatatan akuntansi akan dilanjutkan dengan penyesuaian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar
Entitas
Rp77.156.480.440,00

Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp77.156.480.440,00 dan Rp57.337.863.145,00.

Tabel 56 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-271.307.012
Ditagikan ke Entitas Lain	72.861.298.538
Transfer Keluar	-1.402.688.002
Transfer Masuk	586.162.500
Pengesahan Hibah Langsung	5.383.014.416
Jumlah	77.156.480.440

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar **Rp271.307.012,00** dan DKEL sebesar **Rp72.861.298.538,00**.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk (TK/TM) merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk DJPK berasal dari pengalihan penggunaan BMN Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi untuk Laptop dan P.C Unit dengan nilai barang sebesar **Rp586,162,500,00**. Transfer Keluar DJPK berupa kendaraan dinas operasional dan Aset Tetap Renovasi dengan nilai barang sebesar **Rp1.402.688.002,00**.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Nilai pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2023 sebesar **Rp5.383.014.416,00**. Nilai tersebut berasal dari pengesahan Hibah Langsung berupa Jasa, antara lain:

- *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (PROSPERA) dari Pemerintah Australia dengan nomor register 23TSV7CA sesuai BAST nomor BA-2/PK.1/2023 sebesar **Rp2.069.002.731,00**, dan
- Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) dari *United States Agency for International Development* (USAID) dengan nomor register 2F5GEXNA sesuai BAST Nomor: 86/USAID-INA/BAST-Service/DRG/2023 sebesar **Rp3.314.011.685,00**.

E.5 EKUITAS AKHIR*Ekuitas Akhir***Rp26.442.894.850,00**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp26.442.894.850,00** dan **Rp16.046.970.576,00**.

Tabel 57 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir

2023	2022	Kenaikan/(Penurunan)
26.442.894.850	16.046.970.576	10.395.924.274

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Nilai utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp369.826.268,00** sudah diselesaikan melalui SPM tanggal 4 Januari 2024 dan 5 Januari 2024 serta SP2D tanggal 5 Januari 2024 dan 9 Januari 2024, sebagai berikut:

Jenis Tagihan	No. SPP	Tgl SPP	No. SPM	Tgl SPM	No. SP2D	Tgl SP2D	Belanja	Potongan Pendapatan	Nilai SP2D
172 - Pembayaran RPATA	00003T	05/01/2024	00003A	05/01/2024	249991302001767	09/01/2024	179.907.342	21.070.229	158.837.113
172 - Pembayaran RPATA	00002T	05/01/2024	00002A	05/01/2024	249991305000357	09/01/2024	54.390.000	6.370.000	48.020.000
172 - Pembayaran RPATA	00001T	04/01/2024	00001A	04/01/2024	249991305000178	05/01/2024	133.397.025	15.623.075	117.773.950

- Jumlah sebesar Rp5.115.384,00 merupakan selisih antara dana yang tersedia di RPATA dengan pembayaran kepada pihak ketiga telah dilakukan penihilan RPATA dengan SPP 00004T atas Kontrak Nomor SP-0001/PPK/DJPK/2023 untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor DJPK Tanggal 5 Januari 2024 dengan SP2D Nomor 240190301000044 tanggal 9 Januari 2024.
- Hasil Pemeriksaan BPK atas pekerjaan renovasi ruang set up ABW lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro yang mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp14.988.276,00**. Telah ditindaklanjuti dengan penagihan kepada penyedia dengan surat S-2/PK.143/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan disetor ke kas negara pada tanggal 3 Mei 2024 dengan NTPN : 5C64761QV3U7OM03. Jumlah tersebut telah disetujui usulan jurnal koreksi nya pada Rekonsiliasi Tripartit dengan BPK pada tanggal 6 Mei 2024 untuk menyesuaikan pos neraca yaitu Piutang Lainnya dan pos Ekuitas yaitu Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Utilisasi Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berupa Rumah Dinas Jabatan Eselon I untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor BA-30/PR.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, dan Perjanjian Utilisasi Penggunaan nomor PRJ-25/PR.1/2022 dan PRJ-1/PK.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, maka seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang masih melekat pada BMN berupa Rumah Dinas Golongan I Tipe A Permanen yang berlokasi di Jalan Sanjaya Buntu No.4 RT.005/RW.004 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan nilai perolehan Rp1.771.513.114,00 telah beralih ke DJPK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak penandatanganan BAST.



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

CETAKAN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 5:16 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	271,307,012	271,307,012	0	0	187,642,654	187,642,654	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	271,307,012	271,307,012	0	0	187,642,654	187,642,654	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	271,307,012	271,307,012	0	0	187,642,654	187,642,654	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	74,646,676,000	72,861,298,538	(1,785,377,462)	98	54,878,476,000	53,620,999,048	(1,257,476,952)	98
1. Belanja Pegawai	4,127,431,000	3,854,232,000	(273,199,000)	93	13,931,013,000	13,671,787,310	(259,225,690)	98
2. Belanja Barang	46,941,867,000	45,436,045,543	(1,505,821,457)	97	37,583,647,000	36,648,320,288	(935,326,712)	98
3. Belanja Modal	23,577,378,000	23,571,020,995	(6,357,005)	100	3,363,816,000	3,300,891,460	(62,924,550)	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 5:16 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	74,646,676,000	72,861,298,538	(1,785,377,462)	98	54,878,476,000	53,620,999,048	(1,257,476,952)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 5:21 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	65,722,182	53,414,748	12,307,434	23.04
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,608,847)	(50,747,310)	(61,537)	0.12
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	14,913,335	2,667,438	12,245,897	459.09
Persediaan	1,316,916,205	1,144,469,305	172,446,900	15.07
JUMLAH ASET LANCAR	1,331,829,540	1,147,136,743	184,692,797	16.10
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	122,508,086,200	103,764,804,143	18,743,282,057	18.06
Gedung dan Bangunan	1,427,595,200	1,427,595,200	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	669,888,518	651,888,518	18,000,000	2.76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	64,705,508	0	64,705,508	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(101,188,360,926)	(93,483,455,734)	(7,704,905,192)	8.24
JUMLAH ASET TETAP	23,501,914,500	12,380,832,127	11,121,082,373	89.82
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	10,672,409,204	9,891,147,894	781,261,510	7.90
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	372,809,751	0	372,809,751	0.00
Aset Lain-lain	948,603,155	448,631,261	499,971,894	111.44
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(10,014,845,032)	(7,814,946,417)	(2,199,898,615)	28.15
JUMLAH ASET LAINNYA	1,978,977,878	2,524,832,538	(545,855,460)	(21.62)
JUMLAH ASET	26,812,721,118	16,052,801,408	10,759,919,710	67.03
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	369,826,268	5,830,832	363,995,436	6,242.60
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	369,826,268	5,830,832	363,995,436	6,242.60
JUMLAH KEWAJIBAN	369,826,268	5,830,832	363,995,436	6,242.60
EKUITAS				
Ekuitas	26,442,894,850	16,046,970,576	10,395,924,274	64.78
JUMLAH EKUITAS	26,442,894,850	16,046,970,576	10,395,924,274	64.78
JUMLAH EKUITAS	26,442,894,850	16,046,970,576	10,395,924,274	64.78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,812,721,118	16,052,801,408	10,759,919,710	67.03

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:24 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	18,045,920	(18,045,920)	(100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	18,045,920	(18,045,920)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	18,045,920	(18,045,920)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,853,583,000	13,445,841,459	(9,592,258,459)	(71.34)
Beban Persediaan	743,813,328	690,101,447	53,711,881	7.754
Beban Barang dan Jasa	22,961,090,748	19,052,980,883	3,908,109,865	20.512
Beban Pemeliharaan	8,968,900,885	5,781,928,005	3,186,972,880	35.948
Beban Perjalanan Dinas	19,964,833,803	14,340,970,181	5,623,863,622	39.215
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:24 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	12,552,078,331	9,490,703,852	3,061,374,479	32.257
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	61,537	(17,146)	78,683	(458.9)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	67,044,170,612	62,782,506,681	4,261,663,931	6.788
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(67,044,170,612)	(62,786,460,761)	(4,277,709,851)	6.815
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	257,379,170	149,446,792	107,932,378	72.221
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	257,379,170	149,446,792	107,932,378	72.221
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,247,000	(338,344,743)	349,591,743	(103.324)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,247,000	16,040,000	(4,793,000)	(29.882)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	354,384,743	(354,384,743)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	268,626,170	(188,897,951)	457,524,121	(242.207)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(66,775,544,442)	(62,955,358,712)	(3,820,185,730)	6.068
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(66,775,544,442)	(62,955,358,712)	(3,820,185,730)	6.068

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tgl Data : 07/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:28 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	16,046,970,576	21,664,466,143	(5,617,495,567)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(66,775,544,442)	(62,955,358,712)	(3,820,185,730)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	14,988,276	0	14,988,276	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	14,988,276	0	14,988,276	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	77,156,480,440	57,337,863,145	19,818,617,295	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,395,924,274	(5,617,495,567)	16,013,419,841	-
EKUITAS AKHIR	26,442,894,850	16,046,970,576	10,395,924,274	-

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 24/07/2023 7:12 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,733,906	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,680,842	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	50,733,906
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	13,404
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,068,668,797	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	75,800,508	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	103,764,804,143	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,427,595,200	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	651,888,518	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	93,304,051,953
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	159,403,781
0.0	162151	Software	9,060,922,478	0
0.0	162161	Lisensi	830,225,216	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	448,631,261	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	374,631,261
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	7,212,650,623
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	227,664,533
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	649,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	5,181,832
0.0	391111	Ekuitas	0	16,046,970,576
JUMLAH			117,381,950,869	117,381,950,869

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440041) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:14 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penarikan Negara Bukan Pajak	50,733,908	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	14,988,278	0
0.0	116211	Penyaliran Piutang Tidak Tertagih – Piutang PHBP	0	50,733,908
0.0	116212	Penyaliran Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	74,941
0.0	117111	Beban Konsumsi	1,268,721,228	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	48,194,079	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	122,508,088,200	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,427,588,200	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	689,888,518	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	84,708,508	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	100,969,935,871
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	198,425,085
0.0	162151	Software	9,800,803,988	0
0.0	162161	Lisensi	871,605,218	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	372,888,751	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	948,603,155	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	874,603,155
0.0	169313	Akumulasi Amortisasi Software	0	8,826,821,786
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	313,426,091
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	2,131,901
0.0	212191	Uang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	387,694,387
0.0	313111	Dibagikan ke Entitas Lain	0	72,881,298,538
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	271,307,012	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,402,688,002	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	588,162,500
0.0	391111	Eksitas	0	16,048,978,578
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	14,988,278
0.0	391131	Penghasilan Hibah Langsung	0	5,383,014,418
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,378,489
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	38,000,761
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,247,000
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,642,406,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	211,177,000	0
3.0	521111	Beban Kebutuhan Perkantoran	8,018,030,158	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	220,898,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	574,548,000	0
3.0	521119	Beban Beban Operasional Lainnya	798,798,400	0
3.0	521131	Beban Beban Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8,158,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:14 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	3,115,027,994	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	500,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	324,884,750	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	195,930,336	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,751,500	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	5,521,876,666	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,232,385,318	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,722,187,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,919,614,036	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	939,105,838	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	72,600,659	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,197,182,594	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jangitan	20,437,320	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	615,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,388,034,208	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,400,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,700,237,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,284,740,711	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,542,421,794	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,813,130,336	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39,021,274	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,614,171,163	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	85,755,558	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	743,613,328	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	124,583,454	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	61,537	0
JUMLAH			206,764,901,549	206,764,901,549

Jakarta, Mei 2024

Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
 Luky Alfirman



NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440041) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tgl Data : 07/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	72,861,298,538
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	271,307,012	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,378,409
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	35,000,761
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,247,600
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,880,842
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,648,019,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	211,177,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,018,000,128	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos/Postal	228,898,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Saluran Kerja	574,548,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	798,798,400	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8,158,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,118,859,994	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	309,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	324,884,750	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	949,393,367	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,478,591	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	195,001,968	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,221,340	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	138,862,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,232,385,318	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,722,187,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,919,814,038	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	939,105,838	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91,250,325	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	71,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,202,297,978	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	20,437,580	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	815,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,612,338,501	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,480,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,701,757,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,293,882,181	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,587,824,008	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,535,344,800	0
3.0	538111	Belanja Modal Lainnya	2,035,878,195	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 5:35 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	2,964,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	1,632,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	244,304,203
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,520,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	29,251,470
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	25,202,212
JUMLAH			73,437,479,435	73,437,479,435

Jakarta, Mei 2024
 Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
 Luky Alfirman



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/24 5:38 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,378,409	0	222,378,409	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	35,000,761	0	35,000,761	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	257,379,170	0	257,379,170	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,247,000	0	11,247,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,680,842	0	2,680,842	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	13,927,842	0	13,927,842	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	271,307,012	0	271,307,012	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	271,307,012	0	271,307,012	

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAPORAN REALISASI BELANJA PER AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERBIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 5:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 1:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,399,377,000	3,810,583,000	3,646,019,000	2,964,000	3,643,055,000	95.68	167,528,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,399,377,000	3,810,583,000	3,646,019,000	2,964,000	3,643,055,000	95.68	167,528,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111								
5122	Belanja Lembur	259,680,000	316,848,000	211,177,000	0	211,177,000	66.65	105,671,000
512211	Belanja Uang Lembur	259,680,000	316,848,000	211,177,000	0	211,177,000	66.65	105,671,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122								
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51		4,659,057,000	4,127,431,000	3,857,196,000	2,964,000	3,854,232,000	93.45	273,199,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	6,237,249,000	6,089,789,000	6,018,030,158	0	6,018,030,158	98.82	71,758,842
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	61,332,000	0	0	0	0	0	0
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	360,000,000	272,568,000	220,896,500	0	220,896,500	81.04	51,671,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	571,440,000	587,809,000	574,548,000	0	574,548,000	97.74	13,261,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86,730,000	797,405,000	796,799,400	0	796,799,400	99.92	605,600
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	241,060,000	8,159,000	8,158,500	0	8,158,500	99.99	500
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,557,811,000	7,755,730,000	7,618,432,558	0	7,618,432,558	98.23	137,297,442
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211								
5212	Belanja Barang Non Operasional	1,779,666,000	3,325,714,000	3,116,659,994	1,632,000	3,115,027,994	93.71	210,686,006
521211	Belanja Bahan	534,440,000	311,221,000	309,000,000	0	309,000,000	99.29	2,221,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	300,490,000	325,879,000	324,884,750	0	324,884,750	99.69	954,250
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,614,596,000	3,962,814,000	3,750,544,744	1,632,000	3,748,912,744	94.64	213,901,256
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212								
5218	Belanja Barang Persediaan	1,000,000,000	950,000,000	949,393,357	0	949,393,357	99.94	606,643
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000,000,000	950,000,000	949,393,357	0	949,393,357	99.94	606,643
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218								
5221	Belanja Jasa	12,000,000	1,560,000	1,478,591	0	1,478,591	94.78	81,409
522111	Belanja Langganan Listrik	200,400,000	212,400,000	195,031,526	0	195,031,526	91.82	17,368,074
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	5,220,000	4,221,340	0	4,221,340	80.87	998,660
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	305,013,000	138,862,250	0	138,862,250	45.53	166,150,750
522131	Belanja Jasa Konsultansi	1,565,714,000	1,232,518,000	1,232,385,316	0	1,232,385,316	99.99	132,682
522142	Belanja Sewa	4,274,425,000	1,775,998,000	1,722,187,500	0	1,722,187,500	96.97	53,810,500
522151	Belanja Jasa Profesi	6,846,558,000	2,929,522,000	2,919,614,036	0	2,919,614,036	99.66	9,907,964
522191	Belanja Jasa Lainnya	108,955,000	0	0	0	0	0	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERBIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 5:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 1:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221		13,050,052,000	6,462,231,000	6,213,780,961	0	6,213,780,961	96.16	248,450,039
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,324,375,000	974,060,000	939,105,838	0	939,105,838	96.41	34,954,162
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120,000,000	120,000,000	91,250,325	0	91,250,325	76.04	28,749,675
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	97,624,000	90,860,000	72,600,659	0	72,600,659	79.9	18,259,341
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,507,590,000	5,274,556,000	5,202,297,978	0	5,202,297,978	98.63	72,258,022
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	12,000,000	20,438,000	20,437,320	0	20,437,320	100	680
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	512,000,000	615,003,000	615,000,000	0	615,000,000	100	3,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231		6,573,789,000	7,094,917,000	6,940,692,120	0	6,940,692,120	97.83	154,224,880
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,153,407,000	9,912,449,000	9,612,338,501	244,304,203	9,368,034,298	96.97	544,414,702
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,700,000	97,356,000	89,400,000	0	89,400,000	91.83	7,956,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,513,917,000	7,782,707,000	7,701,757,000	1,520,000	7,700,237,000	98.96	82,470,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	114,590,000	1,354,908,000	1,293,992,181	29,251,470	1,264,740,711	95.5	90,167,289
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241		9,848,614,000	19,147,420,000	18,697,487,682	275,075,673	18,422,412,009	97.65	725,007,991
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,629,201,000	1,568,755,000	1,567,624,006	25,202,212	1,542,421,794	99.93	26,333,206
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242		1,629,201,000	1,568,755,000	1,567,624,006	25,202,212	1,542,421,794	99.93	26,333,206
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52		42,274,063,000	46,941,867,000	45,737,955,428	301,909,885	45,436,045,543	97.44	1,505,821,457
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,766,606,000	21,541,329,000	21,535,344,800	0	21,535,344,800	99.97	5,984,200
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,766,606,000	21,541,329,000	21,535,344,800	0	21,535,344,800	99.97	5,984,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321								
5361	Belanja Modal Lainnya	2,650,000,000	2,036,049,000	2,035,676,195	0	2,035,676,195	99.98	372,805
536111	Belanja Modal Lainnya	2,650,000,000	2,036,049,000	2,035,676,195	0	2,035,676,195	99.98	372,805
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361								
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53		24,416,606,000	23,577,378,000	23,571,020,995	0	23,571,020,995	99.97	6,357,005
JUMLAH BELANJA		71,349,726,000	74,646,676,000	73,166,172,423	304,873,885	72,861,298,538	98.02	1,785,377,462

Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah
1.	Nama Hibah Luar Negeri	<i>Australia Indonesia Partnership For Economic Development (PROSPERA)</i>	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)	
2.	Pemberi Hibah	<i>Departement Of Foreign Affair And Trade (DFAT) - Pemerintah Australia</i>	<i>United States Agency For International Development (USAID)</i>	
3.	Nama Proyek	<i>Program Australia Indonesia Partnership For Economic Development (PROSPERA)</i>	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)	
4.	Grant ID	SA 04.12.2017	497-AA-040 LGP	
5.	No. Register	23TSV7CA	2F5GEXNA	
6.	Date Sign	4 Desember 2017	6 April 2021	
7.	Date Effective	1 Januari 2016	6 April 2021	
8.	Closing Date	28 Februari 2026	30 September 2025	
9.	Grant Amount	AUD\$145.000.000	USD 38.500.000	
10.	Disbursement s.d 2022	Rp2.069.002.731,00	Rp3.314.011.685,00	
11.	Disbursement pada tahun 2023	Rp2.069.002.731,00	Rp3.314.011.685,00	
12.	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang			
	c. Belanja Modal			
	d. Belanja Bansos			
13.	Neraca (Rupiah)			Rp5.383.014.416,00
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
	e. Ekuitas	Rp2.069.002.731,00	Rp3.314.011.685,00	Rp5.383.014.416,00
14.	Executing Agency	Kementerian Koordinator Perekonomian	Kementerian Dalam Negeri	
15.	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	BPK	

SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 440941
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	74,646,676,000	74,646,676,000	0
2	Belanja	73,166,172,423	73,166,172,423	0
3	Pengembalian Belanja	-304,873,885	-304,873,885	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	271,307,012	271,307,012	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	5,383,014,416	5,383,014,416	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JAN-24





DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan 2023 Audited

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Jalan Dr. Wahidin
Gd. Radius Prawiro, Jakarta Pusat

www.djpk.kemenkeu.go.id
dering DJPK 150420